

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Reza Auliansyah
NIM 08210063



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA GONO-GINI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh kerennya, batal demi hukum.

Malang, Juni 2015

Penulis,

Reza Auliansyah

NIM 08210063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Reza Auliansyah,NIM 08210063, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca,mengamati berbagai data yang ada di dalamnya,dan mengoreksi,maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA GONO-GINI

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,

Malang, Juni 2015

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA

Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji skripsi saudara Reza Auliansyah, NIM 08210063, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA GONO-GINI

Telah dinyatakan lulus

Dengan penguji:

1. Jamilah, MA
NIP. 197901242009012007 (_____
Ketua
 2. Dr.Zaenul Mahmudi,MA
NIP. 197306031999031001 (_____
Penguji Utama
 - 3 Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003 (_____
Sekretaris

Malang, 13 Juli 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

لَوْ لَا عِلْمٌ لَكَانَ النَّاسُ كَأَلْبَهَائِمٍ

"Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang."

أَطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْخِدِ

"Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MALANG** dapat di selesaikan dengan curahan kasih saying-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau dii hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang yang tidak pernah mengenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi, serta dorongannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt selalu melimpahkan *rahmat* dan *maghfiroh*-Nya atas ketulusan mendidik putra-putrinya.
2. Dr.Sudirman, MA. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. H. Thoriquddin.LC.M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kapada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencerahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
8. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Mei 2015
Penulis,

Reza Auliansyah
NIM 08210063

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian	7

BAB 11 PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama	16
B. Pembagian Harta Bersama	
1. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia	17
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	18

BAB 111 KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PA.MALANG (0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg)

A. Sejarah PA.Malang	25
B. Kedudukan dan Kewenangan PA. Malang	26
C. Putusan nomer (0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg).....	28
D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta	

Bersama	53
---------------	----

BAB 1V ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama di PA.Malang	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran	61
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Auliansyah Reza 2015. **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Harta gono-gini di Pengadilan agama Malang.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman. M.A

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama (Gono – Gini)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Selain Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum

Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama Malang. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Dan dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak $1/2$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama.

مستخلص البحث

رضا أولينشاح عام ٢٠١٥ . والأساس المنطقي القاضي في البت كنز جيني جونو في المحكمة الدينية مالانج. البحث. موضوع الأحوال الشخصية ، الكلية الشريعة، الجامعة الحكيمية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان الماجستير

الكلمات الرئيسية : الطلاق، المشتركة الكن

فالقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ المتعلق بالزواج وتنص المادة ١ أن الزواج هو السند العاطفي والجسدي بين الرجل والمرأة للزوج والزوجة بهدف تكوين الأسرة (أسرة) سعداء وإلى الأبد على أساس الله. وبالتالي من المتوقع دائماً الزواج من عده مع سعيدة والأبدية، ولكن تحت شروط وظروف معينة الطلاق أمر لا مفر منه واقعاً. الطلاق هو حدث قانونية من شأنها أن تجلب مجموعة متنوعة من الآثار القانونية، واحدة منها تتعلق الملكية المشتركة في الزواج.

لا يتم تعين تقسيم الممتلكات المشتركة وفقاً لأحكام المادة ٣٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ المتعلق بالزواج عليها وكم أجزاء طلق كل زوج أو الزوجة على حد سواء الحية والطلاق يموت الطلاق. المادة (٣٧) الفقرة (١) تنص عندما انطبع الزواج حتى بسبب الطلاق، والملكية المشتركة يحكمها القانون لكل منها. وأكد في توضيح المادة ٣٧ الفقرة (١) كل من هذه القوانين هو القانون الديني والقانون العرفي وغيره من القوانين المعنية مع تقسيم الممتلكات المشتركة. بالإضافة إلى القانون رقم (١) ١٩٧٤ الزواج في إندونيسيا أيضاً تطبيق قانون تجميع الإسلام، الذي يرتبط مع تقسيم الملكية المشتركة على النحو المنصوص عليه في المادة ٩٦ و ٩٧ من تجميع الشريعة الإسلامية.

واستناداً إلى هذه المسائل، والقضايا التي سيتم مناقشتها هي كيفية تنفيذ تقسيم الممتلكات المجتمع أو جونو-جيني في المحكمة الشرعية مالانغ. الطريقة المستخدمة هي طريقة المعياري. ويمكن الاستنتاج أن تقسيم الممتلكات المشتركة (جونو جيني) التي أجريت على أساس قانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية، والثروة المستبددة إما من الزوج أو الزوجة أن معاً بجميع الحقوق غير ينص على خلاف ذلك في عقد الزواج و إذا كسرت الزواج حتى، يحق لكل نصف (نصف) للممتلكات، وأثناء

ABSTRACT

Reza Auliansyah 2015. The Judge Rationale in Deciding treasure Gono-gini in Malang religious court. Thesis. Al-Ahwal Al-shakhsiyah Departement, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Lector: Dr. Sudirman.

Keywords: Divorce, Joint Treasure (Gono - Gini)

In Act No. 1 of 1974 on Marriage Article 1 states that marriage is the emotional and physical bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) are happy and everlasting based on God. Thus marriage is always expected to take place with a happy and eternal, but under certain conditions and circumstances of divorce is unavoidable as a reality. Divorce is a legal event that will bring a variety of legal consequences, one of which is related to the joint property in marriage.

The division of joint property in accordance with the provisions of Article 37 of Law No. 1 of 1974 on Marriage does not set forth how many parts each divorced husband or wife both live and divorce divorce die. Article 37 paragraph (1) states when the marriage broke up because of divorce, the joint property governed by the law of each. The elucidation of Article 37 paragraph (1) is confirmed each of these laws is religious law, customary law and other laws concerned with the division of joint property. In addition to Law No. 1 of 1974 on Marriage, in Indonesia also applies Compilation of Islamic Law, which deals with the division of joint property as provided for in Article 96 and 97 Compilation of Islamic Law.

The issues based on such matters, to be discussed is how the implementation of the division of community property or the Gono-gini in the Religious Court of Malang.

The method used is a normative method. And it can be concluded that the division of joint property (Gono gini) conducted on the basis of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, the wealth derived from either the husband or wife be together all rights not otherwise stipulated in the marriage agreement and if the marriage broke up, each entitled to half (half) of the property, as during the marriage are their joint property.